

Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar

Erna Ervianti
Patahuddin
Baso Intang Sappaile

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

ernaervianti@gmail.com

Abstract: *The study aims at evaluating the inclusive education program implementation at SDN Kalukuang III in Makassar City. The study evaluation research with qualitative approach. The study was conducted at SDN Kalukuang III. The subjects of the study were the Principal, classroom teacher, and teachers with special needs skills. Data were collected by employing observation, interview, and documentation. The results of program implementation evaluation are (i) the lesson plan device is yet to align with students special needs, (ii) human resources need to be improved from the number of teachers and teachers with special need skills, (iii) facility and infrastructure need to be improve, particulary on the aspect of infrastructure, (iv) program implementation extremely needs to be improved, (v) standard competence of graduates with special needs has aligned with guidelines for the implementation of inclusive education, and (vi) assesment standard for students with special needs has aligned with with guidelines for the implementation of inclusive education. The aforementioned results indicate that the program implementation at SDN Kalukuang III has yet to meet all educational national standard. Therefore, it is suggested that is expected to provide again teachers for special needs, provide opportunity for all teachers following training for inclusive eduaction.*

Keyword: *Descrepany, Evaluation, and Inclusive Education Program.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas, dan guru pembimbing khusus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program yaitu: (i) Perangkat perencanaan pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, (ii) Sumber daya manusia perlu di tingkatkan mulai dari peningkatan jumlah guru pembimbing khusus dan keterampilan guru, (iii) Sarana dan prasarana ditingkatkan, khususnya pada prasarana, (iv) pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, (v) standar kompetensi lulusan siswa berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan (vi) standar penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di SD Negeri Kalukuang III belum memenuhi seluruh standar nasional pendidikan. Oleh karena itu diharapkan menyediakan kembali guru pembimbing khusus dan memberikan kesempatan kepada guru kelas untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusi.

Kata Kunci: *Descrepancy, Evaluasi dan Program Pendidikan Inklusi.*

1. Pendahuluan

Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara terpisah (segregasi) dilaksanakan dengan menempatkan anak-anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus. Sistem pendidikan segregasi mengarah pada pola diskriminasi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dengan memisahkannya dengan anak normal yang sebaya.

Menurut O'Hanlon (2003), konsep inklusi menawarkan lebih dari sekedar mentoleransi adanya perbedaan, tetapi lebih menekankan pada ikatan antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas tersebut.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang sudah diamandemen) Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa "setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa melihat adanya perbedaan dalam diri anak, salah satunya adalah melalui inklusi."

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif pasal 2 yaitu ayat (1) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Ainscow (2001) menyatakan bahwa inklusi mendorong terjadinya restrukturisasi terhadap program sekolah dalam rangka merespon keberagaman seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut.

Sekolah Dasar Negeri di kota Makassar merupakan salah satu daerah yang diberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya di sekolah reguler.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti ke beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi pada SD Negeri di Kota Makassar ternyata program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan evaluasi telah dilakukan. Namun kenyataannya pelaksanaan program pendidikan inklusi masih kurang optimal, sehingga belum diketahui secara pasti proses pelaksanaan sudah sesuai atau belum dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal MANDIKDASMEN, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa pada Tahun 2007. Sementara, SD Negeri Kalukuang III merupakan salah satu sekolah rintisan pertama untuk melaksanakan program dan telah dilaksanakan kurang lebih 11 tahun terhitung tahun 2007.

Sehingga berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dari beberapa sekolah dan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar kriteria program maka, peneliti melakukan "Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar".

2. Kajian Pustaka

Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi diartikan sebagai menentukan nilai dan banyak pakar berpendapat berbeda mengenai arti evaluasi tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

pebaikan suatu program.

Menurut Arikunto (2004:1) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Widoyoko (2009) yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.

Berdasarkan pendapat para ahli, evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis dan teratur tentang penilaian terhadap manfaat atau guna beberapa objek, kemudian informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman oleh pengambil keputusan untuk menentukan taraf ketercapaian tujuan dari suatu program.

Berbagai program yang melaksanakan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang diselenggarakan. Salah satu program tersebut yaitu pendidikan inklusif. Menurut Kustawan (2012:8) menyatakan “pendidikan inklusi adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua individu tanpa terkecuali”.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah (2007) pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang

kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler.

Proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada semua tingkatan didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada 8 kriteria standar nasional pendidikan antara lain : isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pada dasarnya kriteria tersebut memiliki keterkaitan sama lain, yang dapat direfleksikan melalui beberapa topik bahasan, antara lain : kurikulum, kualitas pengajaran, aksesibilitas (non fisik dan fisik), struktur organisasi, kebijakan, jejaring dengan masyarakat dan sistem dukungan jaringan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Evaluasi ini dilaksanakan di SD Kalukuang III Kota Makassar. Dilaksanakan pada bulan Februari-April 2018.

Model evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan inklusi yaitu, Model *Descrrepancy*. Langkah pertama yaitu: a. *Design*, b. *Instalation*, c. *Process*, d. *Product*, e. *Comparison*.

Fokus dari penelitian ini adalah Program Pendidikan Inklusi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program pendidikan inklusi yang dilakukan di SD Negeri Kota Makassar.

Subjek dalam penelitian ini adalah: a. Kepala Sekolah, b. Guru Kelas, c. Guru Pembimbing Khusus (GPK). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Lembar Observasi, b. Pedoman Wawancara, c. Lembar Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
- c. Penyajian Data (*Data Display*)
- d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan langkah triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber. Menggali satu sumber yang sama dengan waktu yang berbeda (tepat).

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka peneliti menempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Perbandingan yang ditemukan yaitu, tersedianya sarana dan prasarana yang masih bisa digunakan tetapi pada saat dilakukan wawancara kepada pihak kepala sekolah dan guru ternyata hanya sebagian kecil guru yang dapat menggunakan sarana dan prasarana tersebut.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai prosedur pendidikan inklusi mulai awal dirintis hingga sekarang tidak banyak mengetahui prosedur program tersebut.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru kelas yang memberikan informasi bahwa tersedia alat bantu untuk anak tunagrahita dalam menolah kemampuan motoriknya berupa sepeda khusus. Tetapi pada saat

dilakukan pengecekan pada daftar sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah, sehingga guru-guru juga tidak mengetahui nama alat tersebut secara pasti.

Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini disusun dan ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan evaluasi. Penyusunan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan kajian teori, karakteristik program yang dievaluasi dan standar pelayanan minimal pendidikan nasional menurut Prosedur Operasional Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa pada Tahun 2007.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program pendidikan inklusi di kota Makassar diterapkan pada tiga sekolah percontohan inklusi pada tahun 2007. SD Negeri Kalukuang III merupakan salah satu dari tiga sekolah inklusi yang menjadi percontohan program tersebut di kota Makassar.

Sekolah tersebut menjalankan tugas sebagai sekolah inklusi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007, kemudian di revisi kembali surat keterangan keputusan penetapan sekolah penyelenggara program pendidikan sistem pendidikan inklusi SD, SMP Se Sulawesi selatan dengan nomor surat: 188.4/PD4/397/2011 dengan jumlah sekolah yang semakin banyak ikut serta dalam program tersebut.

Berdasarkan langkah model yang digunakan dalam mengevaluasi perencanaan pembelajaran adalah langkah desain yang mencakup standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pada penelitian ini yaitu tentang

kurikulum, rencana pembelajaran individu (RPI) bagi anak berkebutuhan khusus, serta proses pembelajaran yang berlangsung pada sekolah inklusi tersebut.

Kurikulum yang digunakan oleh sekolah adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh guru untuk siswa berkebutuhan khusus, rencana pembelajaran khusus siswa berkebutuhan khusus juga tidak dibuat oleh guru. Sehingga pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus lebih bersifat spontan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh dari 7 orang guru kelas dan setiap kelas tersebut memiliki anak berkebutuhan khusus. Pada hasil wawancara tersebut pembagian tugas guru mengikuti pelatihan pendidikan inklusi tidak merata.

Pembagian tugas guru mengikuti pelatihan yang tidak merata membuat guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus memiliki informasi yang minim tentang pendidikan inklusi dan cara menangani siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut, sehingga guru kurang paham dalam melaksanakan proses pembelajaran dan cara menghadapi anak berkebutuhan khusus tersebut.

Pada program pendidikan inklusi memerlukan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusi yang optimal. Tersedianya berbagai macam sarana dan prasarana memerlukan informasi untuk mengetahui cara penggunaan sarana dan prasarana tersebut serta cara untuk merawat sarana dan prasarana yang telah disediakan.

Sarana dan prasarana merupakan komponen dari tahap *installation*. Untuk sarana yang tersedia di SD Negeri Kalukuang III sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai sekolah inklusi. Namun, prasarana (ruang sumber belajar

ABK) tidak memadai. Hal ini disebabkan karena ruang kelas yang disediakan oleh pihak sekolah tidak sesuai dengan standar.

Suatu proses terlaksana sesuai dengan prosedur jika pengelolaannya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

Dalam proses pelaksanaan program pendidikan inklusi pihak sekolah harus melaporkan dokumen penerimaan siswa berkebutuhan khusus tiap tahunnya kepada instansi terkait. Laporan tersebut berguna untuk keberlanjutan dari program tersebut dan surat keputusan dari pemerintah dinas pendidikan provinsi merupakan bukti bahwa program tersebut diakui oleh pihak pemerintah.

Setiap program yang direncanakan kemudian diimplementasikan pasti mengarah pada satu luaran atau tujuan. Luaran tersebut dapat dinilai dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan tolok ukur atau kriteria sukses belajar peserta didik dan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Untuk siswa berkebutuhan khusus di SD Kalukuang III, diberikan standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) sesuai dengan anak normal dan guru memberikan nilai siswa berkebutuhan khusus berdasarkan KKM tersebut.

Pengembangan bakat pada SD Negeri Kalukuang III hanya sedikit melibatkan anak berkebutuhan khusus, siswa yang terlibat yaitu anak kelas V (tunarungu) aktif dalam kegiatan voli dan menari. Sedangkan pengembangan program kompensatori pada anak tidak berjalan disebabkan karena tidak ada GPK dan ruangan belajar khusus anak berkebutuhan khusus.

Program Pendidikan Inklusi dirancang, diterapkan dan dilakukan penilaian. Penilaian merupakan tahap *comparation* yang terjabar pada model evaluasi yang digunakan oleh peneliti. Standar penilaian merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Hasil yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa SD Negeri Kalukuang III tidak ada memiliki penentuan standar kompetensi lulusan bagi anak berkebutuhan khusus, selain itu tidak ada juga penentuan nilai kriteria ketuntasan minimal bagi siswa berkebutuhan khusus dan tidak ada cara menentukan nilai kriteria ketuntasan minimal bagi siswa. Padahal sekolah inklusi harus melakukan modifikasi standar kompetensi lulusan dan nilai kriteria ketuntasan minimal siswa berkebutuhan khusus didasarkan sesuai kemampuan dan kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis.

Perencanaan pembelajaran merupakan aspek standar isi yang erat kaitannya dengan kurikulum, rencana pembelajaran, dan perangkat pembelajaran lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Program pendidikan inklusi juga sangat memerlukan aspek tersebut untuk menjalankan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dan tujuan pembelajaran juga tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kalukuang III, hasil yang didapatkan oleh observer dalam hal ini adalah peneliti, 7 orang guru dan dokumentasi dari sekolah menunjukkan bahwa sekolah inklusi tersebut tidak memiliki kurikulum khusus dan rencana pembelajaran individu bagi anak berkebutuhan khusus, sedangkan pada pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009) menyatakan bahwa apabila penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari peserta didik berkebutuhan

khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rerata maka penyelenggara pendidikan inklusif tersebut harus melakukan pengembangan kurikulum akomodatif.

Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009) pendidik dan tenaga kependidikan sekolah inklusi yaitu tenaga pendidik terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus (GPK) dan tenaga kependidikan yaitu tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar.

Realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan sekolah inklusi yaitu tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Menurut pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, GPK adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan Khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Sarana dan prasarana sekolah inklusif prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus yang berdasar pada pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai Permendiknas No.70 Tahun 2009. Sehingga berdasarkan

temuan sebagian besar sarana yang dibutuhkan oleh siswa ABK telah terpenuhi, hanya saja penyediaan ruang sumber belajar khusus ABK belum dimiliki.

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik berdasar dari pembiayaan yang mendukung pengembangan program. Pada Permendiknas No.70 Tahun 2009, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orangtua. Dan berdasarkan temuan di lapangan pembiayaan tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah selama 7 tahun (2007-2014) dan sekarang hanya menjadi tanggung jawab orang tua.

SD Negeri Kalukuang III merupakan salah satu sekolah pertama yang diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menjalankan program pendidikan inklusi. Pada sekolah tersebut tidak semua jenis disabilitas anak berkebutuhan khusus ada di sekolah. Namun pihak sekolah tidak pernah melakukan penolakan untuk menerima segala jenis kebutuhan khusus pada siswa.

Berdasarkan penelitian dikemukakan bahwa semua guru kelas melakukan identifikasi sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat mengetahui hasil identifikasi dari segi fisik, mental dan kemampuan siswa. Identifikasi dilakukan dengan memberikan tes mengenal huruf, membaca, menulis dan menghitung bagi siswa tersebut.

Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009) menyatakan bahwa apabila penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rerata maka penyelenggara pendidikan inklusif tersebut harus melakukan pengembangan kurikulum akomodatif.

Standar kompetensi lulusan siswa merupakan salah satu cara untuk

mengukur keberhasilan dari implementasi yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa hasil yang diperoleh peneliti untuk mengetahui pencapaian dari pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar.

Pengembangan bakat pada SD Negeri Kalukuang III hanya sedikit melibatkan anak berkebutuhan khusus, siswa yang terlibat yaitu anak kelas V (tunarungu) aktif dalam kegiatan voli dan menari. Sedangkan pengembangan program kompensatori pada anak tidak berjalan disebabkan karena tidak ada GPK dan ruangan belajar khusus anak berkebutuhan khusus.

Ketidaksesuaian antara realita di lapangan dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi menimbulkan paradigma bahwa pencapaian dari pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar berdasarkan standar kompetensi lulusan siswa belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui standar penilaian pada standar kriteria minimum bertujuan untuk mengetahui apakah program pendidikan inklusi dapat menunjukkan bahwa terdapat perbandingan hasil yang dicapai. Hasil yang diperoleh yaitu pada sekolah inklusi tersebut tidak ada penentuan SKL bagi anak berkebutuhan khusus, selain itu tidak ada pula penentuan nilai KKM dan tidak ada cara menentukan nilai KKM bagi siswa tersebut. Di sisi lain menurut pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif (sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009) menyatakan bahwa sekolah inklusi harus melakukan modifikasi SKL dan nilai KKM siswa berkebutuhan khusus didasarkan sesuai kemampuan dan kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis.

Standar penilaian yang digunakan dalam pendidikan inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar belum sesuai dengan standar kriteria minimum

program, di sekolah tersebut tidak ada penentuan SKL bagi anak berkebutuhan khusus, selain itu tidak ada pula penentuan nilai KKM dan tidak ada cara menentukan nilai KKM bagi siswa tersebut.

5. Simpulan, Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dengan hasil analisis evaluasi program, maka dapat disimpulkan dan dikemukakan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

a. Simpulan

- 1) Perencanaan pembelajaran dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar yaitu belum memenuhi standar isi secara menyeluruh.
- 2) Ketepatan sumber daya manusia belum sesuai dengan syarat ketentuan dari program pendidikan inklusi.
- 3) Sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran di sekolah tersebut sudah memenuhi pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hanya saja perlu adanya ruang sumber belajar sebagai prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus.
- 4) Proses Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar yaitu sekolah tersebut menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus tanpa melakukan penolakan. Pada tahun ajaran 2017/2018 dan pengelolaan program yang cukup sistematis karena pelaporan administrasi yang dilakukan rutin setiap tahunnya.
- 5) Kompetensi lulusan siswa belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut sebagai pelaksana pendidikan inklusi. Karena sekolah inklusi harus melakukan modifikasi SKL dan nilai KKM siswa berkebutuhan khusus didasarkan sesuai kemampuan dan kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis.
- 6) Standar penilaian yang digunakan dalam pendidikan inklusi di SD

Negeri Kalukuang III Kota Makassar belum sesuai dengan standar kriteria minimum program. Tetapi guru juga tetap melakukan penilaian dengan memberikan komentar-komentar naratif pada laporan hasil belajar siswa.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran program pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar.

- 1) Bagi Pemerintah Kota
Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Pendidikan Luar Biasa, diharapkan untuk menyediakan kembali GPK langsung dari SLB agar dapat menjadi pendamping konsultatif bagi guru reguler.
- 2) Bagi Kepala Sekolah
Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan pengurangan kelas bagi ABK dan memberikan kesempatan kepada semua guru kelas untuk mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusi.
- 3) Guru Kelas dan Guru Pembimbing Khusus SD Negeri Kalukuang III
Diharapkan ada kerjasama antara guru reguler dan GPK dalam merancang dan mengembangkan kurikulum dan rencana pembelajaran individu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Serta mengadakan dampingan konsultatif dari GPK kepada guru reguler.

c. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti telah menimbang dan memutuskan bahwa program pendidikan inklusi di SD Kalukuang III Kota Makassar dapat dilanjutkan dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan kurikulum akomodatif sangat diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus.

- 2) Perlu diaktifkannya kembali guru pembimbing khusus dalam proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Sekaligus diadakannya kembali pelatihan terhadap guru-guru kelas tentang pendidikan inklusi.
- 3) Pengadaan ruang sumber belajar khusus siswa berkebutuhan khusus
- 4) Bagi pemerintah terkait diharapkan lebih diefektifkan lagi pemantauan secara berkala terhadap sekolah-sekolah rintisan program.
- 5) Bagi pihak sekolah dalam memberikan pelayanan pada bagian standar kompetensi lulusan sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi.
- 6) Perlu digunakan standar khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, agar guru dan orangtua bisa mengetahui perkembangan belajar dari siswa. Tanpa harus mengikuti standar criteria ketuntasan minimum untuk siswa normal.

6. Daftar Rujukan

- Ainscow, M. (Eds.). 1998. *From them to us: An international study of inclusion in education*. Psychology Press.
- Allen, K. Eillen. 1980. *Mainstreaming in Early Childhood Education*. New York, USA : Delmar Publisher Inc.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Buku Public Policy Analysis: an Introduction Second Edition)*. Penerjemah: Samodra Wibawa, Dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hallahan, D.P., Kauffman, J.M. & Pullen, P. C. 2009. *Exceptional Learners An Introduction to Special Education*. New York : Pearson.
- Kustawan, Dedy. 2013. *Pedoman Penetapan KKM Pendidikan Khusus*. Jakarta : PT Luxima Metro Media.
- McLeskey, Rosenberg, & Westling. 2013. *Inclusion Effective Practices for All Students*. Second Edition. USA : Pearson.
- Miles, B. Matthew, Hubberman, & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis Methods Sourcebook*. Singapore: SAGE Publication.
- O'Hanlon, C. 2003. *Educational Inclusion As Action Research*. United Kingdom: McGraw-Hill Education.
- Tayibnapsis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim ASB. 2011. *Panduan I : Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta : Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia.
- Wirawan. 2016. *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pusat.